

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan LHP Kinerja dan LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Penanganan Pandemi COVID-19 kepada Lima Pemerintah Daerah

Pada hari Jumat, 18 Desember 2020, telah dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, BPK menyerahkan LHP secara daring (*online*) melalui *video conference*. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M. Ak., CSFA., CA. kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural dan Fungsional Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020 dengan sasaran pemeriksaan ini meliputi proses pengelolaan atas Penelusuran Kasus (*Tracing*), Pengujian (*Testing*), Perawatan (*Treatment*) dan Edukasi dan Sosialisasi/Komunikasi (*Education/Communication*) dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19, sedangkan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ditujukan untuk menilai kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menangani pandemi COVID-19 terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu pada aspek refocusing dan realokasi APBD, penanganan bidang kesehatan, penanganan bidang sosial, dan penanganan bidang ekonomi.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa kinerja atas penanganan pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah **Cukup Efektif**. Terdapat beberapa capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19, namun juga terdapat beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah untuk perbaikan, dengan uraian sebagai berikut.

a. Upaya *Testing* dalam Penanganan Pandemi COVID-19.

1. pemerintah daerah belum memiliki rencana operasi (*renops*) atau dokumen perencanaan lainnya untuk : a) memastikan pengambilan dan pengiriman specimen ke laboratorium kurang dari 1x24 jam; b) memastikan laboratorium jejaring mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 jam, dan meminimalisir kerusakan spesimen. Pemkot Palangka Raya telah memiliki *renops* dimaksud tetapi belum diperbaharui sesuai dengan kondisi transmisi di wilayahnya dan perubahan-perubahan dalam masa pandemi.
2. Sebagian entitas belum memiliki laboratorium yang memenuhi Standar BSL-2. Laboratorium yang dimiliki belum memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang memadai. Spesimen dari entitas tersebut harus dikirim dan dilakukan pengujian di laboratorium milik Pemerintah

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Provinsi, sehingga masih ditemui pengiriman yang melebihi 1x24 jam dan pengujian spesimen yang melebihi 3x24 jam.

3. Penginputan data spesimen belum tertib, sehingga masih terdapat perbedaan data pengambilan dan pemeriksaan specimen di *All Record*.
 4. Evaluasi dan koordinasi belum dilakukan atas kerusakan spesimen dan kekurangtertiban penginputan data spesimen di kabupaten/kota.
- b. Upaya *Tracing* dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan.
1. pemerintah daerah belum memiliki rencana operasi (renops) atau dokumen perencanaan lainnya diantaranya untuk : a) penemuan kasus secara aktif, baik melalui pelacakan kontak, pada fasilitas tertutup, dan pada pintu masuk wilayah; b) penemuan kasus secara pasif di tempat kerja atau pada kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya penemuan kasus secara aktif dan secara pasif belum optimal karena kurang dibarengi tindakan lanjutan yang memadai.
 2. Pencatatan dan pelaporan data penemuan kasus secara aktif belum tertib, sehingga masih terjadi perbedaan data antara sistem *online* pelaporan harian COVID-19 dengan PHEOC.
 3. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan SDM baik jumlah dan kompetensi dalam melakukan upaya penemuan kasus secara aktif dan pasif.
- c. Upaya *Treatment* dalam Penanganan Pandemi COVID-19.
1. pemerintah daerah belum memiliki renops terkait strategi manajemen klinis untuk pelayanan kesehatan secara komprehensif di Fasyankes, termasuk strategi pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pelayanan kesehatan di fasyankes maupun masyarakat.
 2. penunjukan dan penetapan rumah sakit rujukan COVID-19 belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan rumah sakit tersebut. Sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan BMHP untuk kegiatan *treatment* belum sepenuhnya tersedia sesuai kebutuhan.
 3. tenaga kesehatan belum mencukupi untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien COVID-19 dan pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
 4. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis belum dilaksanakan secara komprehensif.
- d. Upaya Edukasi dan Sosialisasi dalam Penanganan Pandemi COVID-19.
1. Salah satu entitas belum memiliki perencanaan strategis terkait komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan COVID-19 yang komprehensif
 2. belum tersedia perencanaan strategis untuk pemantauan, evaluasi dan koordinasi atas pelaksanaan regulasi yang mengatur protokol kesehatan di tempat umum yang dilakukan kabupaten/kota.
 3. penyampaian pesan kunci kesehatan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



4. upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal.
5. Pemerintah Daerah belum memiliki regulasi yang mengatur keharusan tempat umum melengkapi tanda-tanda protokol kesehatan dan regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar *social engineering*.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp274,80 Miliar dengan realisasi sebesar Rp136,38 Miliar atau 49,63%, yang terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp88,01 Miliar dan penanganan sosial sebesar Rp48,37 Miliar. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp63,47 Miliar dengan realisasi sebesar Rp41,28 Miliar atau 65,05%, yang terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp35,85 Miliar, penanganan sosial sebesar Rp4,39 Miliar, dan penanganan ekonomi sebesar Rp1,04 Miliar.

Sesuai hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah **"Sesuai Dengan Pengecualian"**. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam laporan hasil pemeriksaan antara lain.

- a. Beberapa pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp636.627.458,74 dan pajak belum disetor sebesar Rp256.857.154,50;
- b. Beberapa pembayaran belanja insentif tenaga kesehatan tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp495.473.181,82 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp103.636.364,00
- c. Pengelolaan data DTKS dan non-DTKS belum optimal dan kurang dapat diyakini validitasnya
- d. *Refocusing* kegiatan dan realokasi APBD dalam penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
- e. Penatausahaan dan pengelolaan sumbangan pihak ketiga dalam penanganan pandemi COVID-19 tidak sesuai ketentuan
- f. Penetapan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penanganan dampak ekonomi terkait COVID-19 tidak optimal

Sebagai penutup, Kepala Perwakilan mengharapkan peran dari para pemilik kepentingan, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari permasalahan-permasalahan yang ditemui.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id